

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat kuat dan sangat penting di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan merupakan dasar pendorong perekonomian Indonesia (Julianto dkk, 2024)

UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah. Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja (Kemenkop UKM, 2022). Perkembangan UMKM dan Koperasi di Daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. UMKM tersebar di seluruh Kabupaten di Bali, salah satunya di Kecamatan Buleleng. Perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng bisa dikatakan cukup pesat karena setiap tahunnya UMKM selalu meningkat. Salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi melalui UMKM adalah Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Desa Kalibukbuk merupakan salah satu desa pesisir di wilayah Kecamatan Buleleng yang terkenal sebagai daerah pariwisata, khususnya dengan ikon wisata Lovina. Selain sektor

pariwisata, kegiatan ekonomi masyarakat di desa ini juga ditopang oleh UMKM seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal serta hotel. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Kalibukbuk tahun 2023, terdapat 51 unit UMKM aktif, namun jumlah ini menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020 yang sebelumnya mencapai 66 unit. Di Tengah peran vital tersebut, UMKM di Desa Kalibukbuk, Kecamatan buleleng, menghadapi tantangan serius dalam aspek akuntabilitas keuangan, yang berdampak pada keberlangsungan usaha mereka.

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan (Ayu Wulan Trisna dkk, 2023). Akuntabilitas keuangan dapat membantu mengurangi risiko kegagalan usaha UMKM dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan membuat Keputusan yang tepat sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan membuat Keputusan yang tepat. Sayangnya, berbagai studi dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas keuangan menjadi salah satu penyebab utama kegagalan UMKM. Ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan, rendahnya pemahaman terhadap prinsip- prinsip akuntansi, serta lemahnya literasi keuangan menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif. Banyak UMKM yang terlalu fokus kepada bagaimana membuat sebuah produk yang unik, sedangkan sistem akuntansi dan keuangan sering kali dinomorduakan.

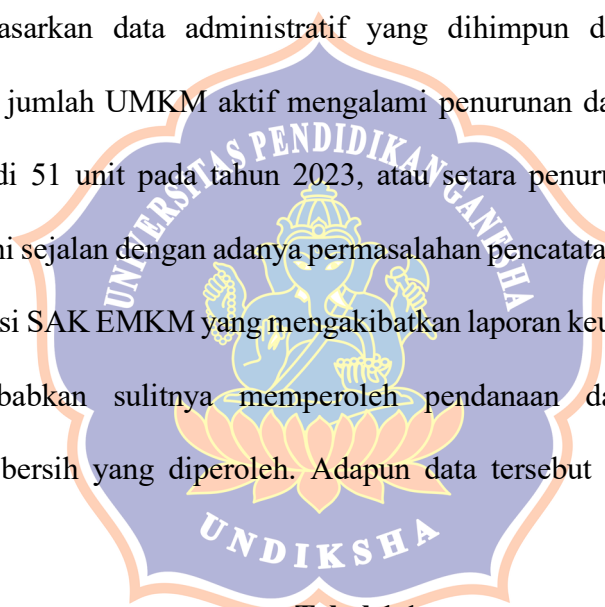
Hal ini mengakibatkan data keuangan mereka tidak relevan karena dilakukan dengan pencataan seadanya (Sinarwati, 2017).

Fenomena tingginya angka kegagalan UMKM Di Desa kalibukbuk dikarenakan sebagian besar UMKM dalam penerapan akuntabilitas keuangan belum berdasarkan pada SAK EMKM. SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, standar akuntansi yang sangat disederhanakan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (IAI) khusus untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan yang mudah dipahami, hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), dan Catatan atas Laporan Keuangan, menggunakan dasar pengukuran biaya historis, efektif sejak 1 Januari 2018.

Rendahnya akuntabilitas, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan, menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai kinerja dan kondisi keuangan usahanya. Ketidaktelitian informasi ini mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan usaha, pengelolaan arus kas yang tidak terkendali, serta ketidakmampuan mengantisipasi risiko usaha. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut meningkatkan kerentanan UMKM terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan pasar, dan perubahan permintaan konsumen, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan usaha. Selain berdampak pada internal usaha, rendahnya akuntabilitas juga memperlemah hubungan UMKM dengan pihak eksternal. Lembaga keuangan, investor, dan pemerintah menjadikan akuntabilitas sebagai indikator utama dalam menilai kelayakan dan kredibilitas usaha. UMKM yang tidak mampu

menunjukkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban usaha yang memadai cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan ini menghambat upaya pengembangan usaha dan menurunkan daya saing UMKM, sehingga semakin memperbesar kemungkinan menurunnya jumlah UMKM. Dengan demikian, rendahnya akuntabilitas menjadi sebab yang sistematis, mulai dari lemahnya pengelolaan internal, terbatasnya akses sumber daya eksternal, hingga meningkatnya tingkat kegagalan usaha. Serangkaian sebab-sebab tersebut secara nyata berkontribusi terhadap menurunnya jumlah UMKM yang beroperasi.

Berdasarkan data administratif yang dihimpun dari Pemerintah Desa Kalibukbuk, jumlah UMKM aktif mengalami penurunan dari 66 unit pada tahun 2020 menjadi 51 unit pada tahun 2023, atau setara penurunan sebesar 22,73%. Penurunan ini sejalan dengan adanya permasalahan pencatatan keuangan yang tidak terstandarisasi SAK EMKM yang mengakibatkan laporan keuangan tidak akuntabel dan menyebabkan sulitnya memperoleh pendanaan dan sulit mengetahui keuntungan bersih yang diperoleh. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Aktif

Tahun	Jumlah UMKM Aktif	Penurunan Dari Tahun Sebelumnya
Tahun 2020	66	-
Tahun 2021	58	-8 UMKM
Tahun 2022	53	-5 UMKM
Tahun 2023	51	-2 UMKM

Sumber. Data Administrasi Desa Kalibukbuk

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai penurunan jumlah UMKM yang berada di Desa Kalibukbuk diketahui terjadi penurunan jumlah UMKM aktif dari tahun

ke tahun, dengan total penurunan sebesar 15 UMKM atau sekitar 22,7% dalam kurun waktu tiga tahun. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti kepada 15 pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk pada bulan Mei 2025, ditemukan bahwa sebagian besar tidak melakukan standarisasi pencatatan keuangan menggunakan SAK EMKM dan bahkan belum mengetahui standarisasi tersebut. Padahal pelaporan keuangan yang terstandarisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban terhadap pemilik/investor. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya sistem akuntabilitas keuangan yang dimiliki UMKM di Desa Kalibukbuk berimbas pada keberlangsungan UMKM tersebut. Ketidaktahuan perputaran arus kas pada usahanya dikarenakan pencatatan yang belum terstandarisasi serta sulitnya mengakses pemodal dari beberapa instansi karena laporan keuangan yang tidak akuntabel. Hal tersebut menjadi pertimbangan para pemberi modal untuk mengukur potensi keuangan para UMKM ini. Kekurangan modal kerap menjadi faktor penyebab kegagalan usaha UMKM di Desa Kalibukbuk.

Dari data tersebut dapat dilihat minimnya akuntabilitas pada UMKM di Desa Kalibukbuk menyebabkan terjadinya penurunan jumlah UMKM pada daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaku UMKM untuk bertahan karena akuntabilitas keuangan yang kurang. Para pelaku UMKM sulit mengatur keuangan usaha, mereka cenderung tidak memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Ketiadaan pencatatan yang terstandarisasi menyulitkan proses evaluasi kinerja usaha, memperbesar risiko salah dalam pengambilan keputusan, dan menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang mensyaratkan laporan keuangan. Serta

dengan tidak adanya akuntabilitas keuangan menjadikan kurangnya ketepatan pengambilan keputusan yang akan berimbas pada keberlanjutan usaha mereka. Hal-hal tersebut membuat jumlah UMKM di Desa kalibukbuk berkurang, khususnya bagi pelaku UMKM yang tidak memperhatikan akuntabilitas keuangan akan sulit untuk mempertahankan usaha sehingga terjadi kebangkrutan

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk memahami secara mendalam faktor-faktor internal yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan UMKM. Ketidakmampuan pelaku UMKM dalam mencatat transaksi secara sistematis, menyusun laporan keuangan, serta minimnya kemampuan analisis keuangan menyebabkan kesulitan dalam mengakses permodalan, mempertahankan operasional usaha, dan menghadapi tekanan pasar. Penurunan ini menjadi bukti lemahnya akuntabilitas keuangan pada UMKM di Desa Kalibukbuk, penurunan ini mungkin bukan hanya akibat faktor eksternal seperti pandemi, melainkan juga internal, seperti minimnya pemahaman akuntansi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, dan keterbatasan modal usaha, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas keuangan UMKM. Ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dapat menghambat UMKM dalam mengambil keputusan strategis yang tepat (Suadnyana Pasek dkk, 2024). Salah satu faktor utama adalah minimnya pemahaman akuntansi, yaitu sejauh mana pelaku UMKM mampu memahami proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi laporan keuangan. Pemahaman akuntansi yang rendah dapat menyebabkan pencatatan keuangan yang tidak sistematis dan tidak akurat, sehingga berdampak negatif terhadap pertanggungjawaban keuangan usaha. Faktor kedua yang tak kalah penting adalah literasi keuangan, yakni kemampuan

individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Literasi keuangan rendah membuat pelaku UMKM rentan dalam mengelola utang, membuat keputusan investasi, dan menilai kesehatan finansial usahanya.

Modal usaha menjadi aspek vital dalam menunjang praktik akuntabilitas. Modal yang cukup memungkinkan UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, membiayai pelatihan akuntansi, bahkan mempekerjakan tenaga ahli yang memahami prinsip akuntansi dan keuangan. Kekurangannya, keterbatasan modal akan membuat UMKM mengabaikan pentingnya pencatatan keuangan karena lebih fokus pada kebutuhan operasional harian. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pengaruh pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha terhadap akuntabilitas keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai penyebab lemahnya akuntabilitas dan solusi yang tepat untuk meningkatkan keinginan untuk berusaha. Ketiga variable tersebut diduga berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen.

Masalah akuntabilitas keuangan pada UMKM di Desa Kalibukbuk dapat memiliki dampak yang signifikan, seperti meningkatkan risiko kegagalan usaha, kurangnya kepercayaan stakeholder dan kesulitan dalam mengakses sumber daya keuangan. Akuntabilitas keuangan menuntut UMKM memiliki sistem pencatatan yang terstandarisasi, laporan keuangan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun eksternal seperti investor,

bank, dan pemerintah. Namun, hasil studi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kalibukbuk belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis dan terstandarisasi. Hal ini menyulitkan evaluasi usaha dan pencapaian efisiensi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara empiris sejauh mana faktor internal seperti pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha mempengaruhi akuntabilitas keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk.

Menurut penelitian dari Edy sujana (2020) Sebagian besar UMK dikelola perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola, sehingga pemilik merasa tidak memiliki waktu untuk membuat laporan keuangan yang memadai. Jikapun membuat, hanya berupa catatan mengenai kas masuk dan kas keluar. Disamping itu, kurangnya pemahaman mengenai pembukuan ataupun akuntansi membuat pelaku UMK merasa apatis terhadap laporan keuangan. Sebagian UMK merasa laporan keuangan tidaklah terlalu penting bagi keberlanjutan usaha yang mereka geluti. Hal ini sejalan dengan bukti terkait adanya masalah akuntabilitas di UMKM di Desa Kalibukbuk yang dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti banyak pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk yang belum memiliki pemahaman akuntansi yang baik, dengan tingkat pemahaman akuntansi dan literasi keuangan yang rendah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM di Kalibukbuk yang masih menyimpan pencatatan secara manual atau bahkan tidak melakukan pencatatan yang sama sekali, sehingga mereka tidak mampu membedakan antara keuangan pribadi dan usaha. Akibatnya, pengambilan keputusan usaha menjadi tidak berdasarkan data yang valid. Menurut (Sinarwati, 2013), Salah satu indikator kesuksesan sebuah usaha, dapat dilihat dari pelaporan

keuangan yang memadai. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik usaha akan mengetahui dengan jelas bagaimana kinerja usaha yang dijalaninya, bagaimana perkembangan modalnya, dan apakah kebutuhan persediaan mencukupi atau tidak.

Selain itu, faktor modal usaha juga turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas. Pelaku UMKM yang memiliki modal terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam memutar arus kas, melakukan investasi peralatan, hingga menyewa tenaga ahli atau mengikuti pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Dalam kondisi seperti ini, akuntabilitas keuangan cenderung diabaikan karena pelaku lebih fokus pada penyediaan kebutuhan operasional jangka pendek. Akuntabilitas ini berdampak kepada kegagalan usaha pelaku UMKM yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian Masyarakat lokal dan menyebabkan bertambahnya pengangguran serta penurunan pendapatan Masyarakat lokal. Jadi, Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis sejauh mana pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk. Dengan memahami pengaruh ketiga variabel tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM berbasis keuangan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya akuntabilitas keuangan pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk yang dibuktikan dengan Banyak pelaku UMKM belum memiliki sistem

pencatatan keuangan yang memadai, hanya mengandalkan catatan manual, bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam menyalakan kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan.

2. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk belum memahami prinsip dasar akuntansi seperti pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan keuangan. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pelaku UMKM masih belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, seperti ringkasan keuangan pribadi dan usaha, serta tidak terbiasa menganalisis laporan keuangan, arus kas, maupun rasio keuangan, sehingga membuat pengambilan keputusan menjadi kurang efektif.
4. Modal yang terbatas membuat pelaku UMKM kesulitan dalam mengembangkan usaha, mengakses pelatihan akuntansi, ataupun menyewa tenaga ahli. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan keuangan sering kali diabaikan karena pelaku lebih fokus pada operasional jangka pendek.
5. Data menunjukkan penurunan jumlah UMKM di Desa Kalibukbuk dari 66 unit pada tahun 2020 menjadi 51 unit pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya masalah struktural, salah satunya adalah lemahnya sistem akuntabilitas keuangan yang menyebabkan kegagalan dalam mempertahankan usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka Penelitian ini berfokus pada permasalahan akuntabilitas keuangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Mengingat luasnya mencakup permasalahan yang terkait dengan keberlangsungan UMKM, maka penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas keuangan, yaitu: pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk?
2. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk?
3. Apakah Modal Usaha berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk?

1.5 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Literasi keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Modal Usaha Akuntabilitas Keuangan UMKM di Desa Kalibukbuk.

1.6 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha terhadap Akuntabilitas Keuangan UMKM. Selain itu hasil penelitian ini dapat mengembangkan teori tentang pentingnya pemahaman akuntansi kepada pelaku UMKM, Literasi keuangan, dan Modal Usaha dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan UMKM.

2. Secara Praktis.

- a. Memberikan informasi kepada pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk tentang pentingnya pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait tentang pentingnya menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Kalibukbuk untuk meningkatkan pemahaman akuntansi, literasi keuangan, dan modal usaha.